

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah media untuk instansi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik berkaitan dengan kinerja keuangan. Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berfungsi sebagai evaluasi kerja, alat pengendalian, dasar penetapan keputusan dan menjadi salah satu dasar pertanggung jawaban. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada di PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010. Setelah menyusun laporan keuangan pemerintahan kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat secara umum dan DPRD/ DPR. Dalam proses penyampaian laporan keuangan, komponen yang disampaikan berupa laporan realisasi anggaran, arus kas, neraca dan laporan atau catatan keuangan.

LKPD yang merupakan singkatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan dan laporan keuangan darii pemda (pemerintah daerah) kemudian digunakan untuk bahan pengambilan keputusan oleh pihak yang bersangkutan. Setiap tahun LKPD akan dinilai kualitasnya oleh BPK. Laporan keuangan bisa ditingkatkan kualitasnya melalui SAP. SAP ialah pedoman untuk menyajikan dan menyusun

laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana yang ada di PP No. 71 tahun 2010 mengenai SAP. Peningkatan kualitas laporan keuangan bisa dibentuk dari unsur-unsur yaitu bisa dibandingkan, relevan, andal dan mudah dipahami.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih pemerintah daerah memiliki tuntutan mengelola keuangan daerah dengan baik. Pengelolaan keuangan bisa dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu mengendalikan kebijakan keuangan daerah dengan transparan, ekonomis, akuntabel dan efisien. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dalam melaporkan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan susunannya berdasarkan SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Data-data yang ada di hendaknya memenuhi karakteristik kualitatif sesuai SAP yang meliputi andal, bisa dipahami, relevan dan bisa dibandingkan. Dalam penyampaian laporan keuangan, komponen yang disampaikan yaitu laporan arus kas, realisasi anggaran, neraca dan laporan atau catatan keuangan.

LKPD disampaikan kepada BPK yang merupakan auditor independen yang memiliki tugas memeriksa LKPD untuk menilai kualitas informasi dari LKPD. Penilaian kualitas tidak hanya didasarkan pada laporan keuangan yang sesuai SAP saja, tetapi juga dilihat dari kualitas sistem pengendalian secara internal, selaras atau tidaknya dengan undang-undang dan bukti-bukti yang akurat

secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang memiliki tugas yaitu menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang di pimpinnya.

Di Indonesia kasus penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah cukup banyak sehingga kualitas laporan keuangan menjadi hal yang unuk diteliti. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pada semester I tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), BPK memeriksa 542 (100%) LKPD tahun 2017. Atas LKPD tersebut, 411 LKPD memperoleh opini WTP, 113 LKPD mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 18 LKPD mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dari 34 pemerintah provinsi, sebanyak 33 LKPD (97%) memperoleh opini WTP dan 1 LKPD (3%) mendapat opini WDP. Dari 415 pemerintah kabupaten, sebanyak 298 LKPD (72%) mendapat opini WTP dan 99 LKPD (24%) dengan opini WDP. Sedangkan dari 93 pemerintah kota, sebanyak 80 LKPD (86%) memperoleh opini WTP dan 13 LKPD (14%) dengan opini WDP (IHPS 1 BPK RI, 2018). Data dari IHPS pada tahun 2018 menghasilkan bahwa terjadi permasalahan dalam laporan keuangan yang berjumlah 2.903 kasus masalah karena telah melanggar aturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian berjumlah Rp. 1,54 triliun dalam LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan atau LKPD 2017.

Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan kepada kabupaten yang memiliki nilai paling tinggi se-Jawa Tengah diraih oleh

Kabupaten Banjarnegara sebanyak delapan kali berturut-turut. Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara mendapat nilai tertinggi berdasarkan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hingga tahun 2020. Beberapa kabupaten layak dibanggakan karena mendapat nilai di atas rata-rata nasional (75,6%). Banjarnegara mendapat nilai 94,86, urutan kedua Solo 93,16, ketiga Magelang 91,30 dan keempat Kendal 79,71. Nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,6 % dan patut dibanggakan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah memperjuangkan dengan kerja keras yang tinggi melalui tata pengelolaan keuangan dan juga pembangunan secara transparan yang menjadikan Kabupaten Banjarnegara dapat memperoleh WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Hal tersebut juga merupakan kontribusi dari para masyarakat yang telah memberikan dukungan dan sumbangsih.

Moermahadi Soerja Djanegara, selaku ketua BPK menyatakan bahwa secara umum masalah laporan keuangan pemerintah diakibatkan karena ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2017 antara lain kurangnya barang atau volume pekerjaan sejumlah Rp 547,96 miliar yang terjadi pada 475 pemda. Menurut data BPK, ada permasalahan yang membuat kerugian yakni ditemukan belanja yang melebihi ketentuan atau tidak sesuai pada 395 pemda senilai Rp 344,45 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pada 262 pemda senilai Rp 148,04 miliar, biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan senilai Rp 87,45 miliar pada 232 pemda, serta penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp 20,72 miliar terjadi pada 54 pemda.

Ketidakpatuhan menyebabkan kerugian hingga 426 permasalahan senilai Rp 317,87 miliar, 868 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 686,49 miliar, serta 2.361 permasalahan penyimpangan administrasi. Dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah Daerah menyerahkan dan menyeter asset dan setor kas daerah atau negara Rp 476,65 miliar.

Penelitian (Sundari dkk, 2018), persamaan tersebut memakai seluruh variabel, namun perbedaan subjek penelitian terletak pada pemerintahan Banjarnegara. Hal ini karena saya menerima pernyataan WTP dari BPKRI mengenai kualitas laporan keuangan tahunan ke-8. Saya akan menerimanya terus menerus. Peringkat WTP ini sejalan dengan salah satu tugas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel. Sekretaris KPPN Banjarnegara Sudarmaji mengatakan, opini WTP sudah memenuhi standar yang jelas dari BPK RI: kepatuhan pada standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan pemerintah dirancang berdasarkan SAP yaitu suatu media yang digunakan untuk menilai laporan dari segi kualitas untuk kemudian dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi telah dirubah atau diganti menjadi Penetapan peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas tentang SAP berbasis akrual.

Penelitian dari Agustini & Yuliani (2016) mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemda hasilnya yaitu penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh yang baik pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian Erawati & Kiranayanti (2016) yang menjelaskan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Daerah Kabupaten Badung.

Penelitian tersebut menghasilkan temuan yaitu sistem pengendalian internal dan sumber daya manusia (SDM) mempunyai pengaruh yang baik pada kualitas pelaporan keuangan. Hal tersebut juga sejalan dengan riset dari (Alamsyah dkk, 2017) Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah (di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas staf, sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh baik pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini juga membahas apa saja faktor atau hal yang dapat memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian (Baturante dkk, 2018). Penelitian ini mengungkap bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem manajemen informasi pemerintahan, akuntansi pemerintahan, penggunaan teknologi

informasi dan budaya birokrasi tinjauan pelaporan keuangan selaras atau cocok dengan penelitian dari (Sundari dkk, 2018).

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian (Armel, Nasir & Safitri, 2017) yang memperoleh hasil penelitian menerangkan Penerapan SAP, memberikan dampak yang positif dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Kota Dumai karena terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan. Maka dari itu laporan keuangan menjadi tidak berkualitas apabila tidak menggunakan laporan standar akuntansi. Teknologi informasi ialah bentuk teknologi yang berguna untuk olah data, diantaranya mendapatkan, menyimpan, memproses, memanipulasi dan menyusun data supaya bisa memberikan data yang tepat waktu, relevan dan akurat dalam rangka menunjang kebutuhan bisnis, pribadi dan pemerintahan. Sistem pengendalian internal juga berdampak positif karena berbagai alat manajemen guna menjamin ketaatan pada peraturan dan hukum, menjamin kualitas data dan laporan keuangan, memfasilitasi efektivitas dan efisiensi operasional pemerintah.

Judul dalam penelitian ini yaitu analisis tentang pengaruh kompetensi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan SAP, teknologi informasi, dan sistem Pengendalian internal dalam SKPD Kabupaten Banjarnegara sehingga dapat dikatakan laporan keuangan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pembentuk dan kriteria laporan yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, bisa dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara?
3. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokuskan maka dibatasi pada Kompetensi, Penerapan SAP, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Menguji secara empiris pengaruh Kompetensi pada Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020.
- b. Menguji secara empiris pengaruh Penerapan Standar Akutansi pada Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020.
- c. Menguji secara empiris pengaruh Teknologi Informasi pada Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020.
- d. Menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2020.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan juga praktis:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa mendukung hipotesis-hipotesis yang mempengaruhi Pengaruh Kompetensi, Penerapan SAP, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal terhadap Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang selama ini belum terbukti.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi SKPD Kota Banjarnegara

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penting bagi SKPD Kota Banjarnegara agar mereka bisa mengetahui apa saja yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

